
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Ilham Ahmad Maulana^{a,*}, Endang Masitoh^b, Riana R Dewi^c

^a Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

^b Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

^c Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

*maulahmad705@gmail.com

Diterima: Januari 2020. Disetujui: Mei 2020. Dipublikasi: Juni 2020

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Over Time Budget Financing (SILPA) and area size on capital expenditure on district / city governments in Central Java for the period of 2016-2018. This research method is quantitative. The population of this research is 35 regencies / cities in Central Java. The sampling method used is saturated sampling so the sample in this study is all members of the population. Data analysis in this study uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the Regional Original Revenue (PAD), the Remaining Budget Financing (SILPA) and the size of the area affect the capital expenditure. While the General Allocation Fund (DAU) has no effect on capital expenditure. The results of this study are expected to contribute to the development of theory, especially those relating to public sector accounting and can be used as material for information and consideration for regional government offices in optimizing regional spending.

Keywords: *Factors; Capital Expenditure;*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan luas wilayah terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2016-2018. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor public dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan daerah.

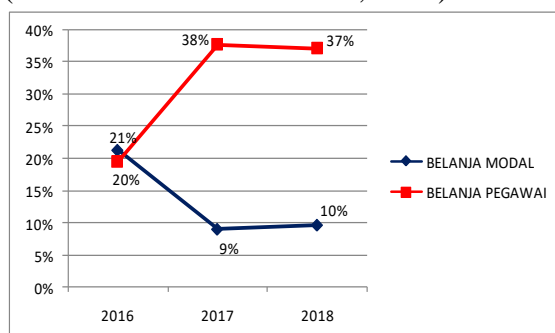
Kata Kunci: Faktor-Faktor; Belanja Modal;

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kuantitas pelayanan publik (Andirfa, 2009).

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah dalam hal pengelolaan anggaran belanja daerah.. Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (expense) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, sedangkan Belanja Modal merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (Mahmudi, 2010).

Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk asset tetap, yaitu peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta dalam tetap lainnya (Kusnandar dan Siswanto, 2012).



Sumber : Laporan realisasi APBD 2016-2018

Gambar 1. Rekapitulasi Persentase Kenaikan dan Penurunan Belanja Pegawai, Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa ada penurunan belanja modal pada tahun 2016 dengan persentase 21% turun menjadi 9% pada tahun 2017 dan terdapat kenaikan pada belanja pegawai pada tahun 2016 dengan persentase 20% menjadi 38% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa APBD yang terealisasi pada 2017 tidak dialokasikan untuk kegiatan yang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja seharusnya digunakan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut (Darwanto & Sari, 2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya diprioritaskan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan bijak karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Robiyanto (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat

yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2018) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian oleh Wibisono & Wildaniati (2016) yang menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kota/kabupaten. Penelitian yang dilakukan Kosim (2017) menyatakan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan hasil penelitian oleh Napitu et al (2018) menyatakan SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Luas wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional kecil (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa daerah yang mempunyai luas wilayah yang lebih besar maka belanja modalnya juga akan semakin tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2016) yang menunjukkan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan riset *gap* dan fenomena maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan luas wilayah terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasil penyajiannya berbentuk angka-angka dan datanya diolah dengan menggunakan teknik statistik. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah berjumlah 35. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi.

Data yang digunakan menggunakan data sekunder berupa laporan APBD untuk variabel PAD, DAU dan SILPA yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan data luas wilayah yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik.

Tabel 1. Variabel dan Pengukuran

No.	Variabel	Indikator
1.	Belanja Modal	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya. (Ayem & Pratama, 2018)
2.	PAD	PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain lain pendapatan daerah yang sah. (Prasetya, 2017)
3.	DAU	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Keterangan: Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

4.	SILPA	(Ayem & Pratama, 2018) SILPA = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto
5.	Luas Wilayah	(Kusumawardani, 2018) Luas wilayah daerah dapat diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut dengan satuan Km ² (Sholikhah & Wahyudin, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbasas dari gangguan normalitas, multikoleniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik merupakan syarat sebelum dilakukan pengujian regresi.

Uji Normalitas

Untuk mengetahui normalitas data dapat dilihat dari *kolmogorov-smirnov* jika nilai signifikansi diatas 0,05 maka data penelitian mengasumsikan terdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Asymp. Sig (2-tailed)	Std	Ket
Uns.Res	105	0,200	>0,05	Data Normal

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan hasil tabel 2 pengujian data normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S), diketahi Asymp.Sig (2-tailed) menunjukkan nilai 0,200, dimana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya.

Uji Multikoleniaritas

Pada penelitian ini uji multikoleniaritas dilakukan dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoleniaritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	Std	VIF	Std	Ket
PAD	0,266	>0,10	3,763	<10	Bebas Multikoleniaritas
DAU	0,334	>0,10	2,997	<10	Bebas Multikoleniaritas
SILPA	0,290	>0,10	3,450	<10	Bebas Multikoleniaritas
LW	0,378	>0,10	2,646	<10	Bebas Multikoleniaritas

Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas pada tabel 3 diketahui bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas pada variabel dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan *Durbin-Watson* (DW test). DW test digunakan untuk korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	DW
Model 1	2,077

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4 dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah data (n) 105 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,7617 dan batas bawah (dL) 1,6038. Karena nilai DW 2,077 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7617 dan kurang dari 4-1,7617 (4-dU) (1,7617 < 2,077 < 2,2383) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

Uji Heterskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode korelasi *Spearman's Rho*.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig (2-tailed)	Std	Keterangan
PAD	0,259	>0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas
DAU	0,986	>0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas
SILPA	0,917	>0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas
LW	0,869	>0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5 diketahui nilai Sig.(2-tailed) masing-masing variabel lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	B
(Constant)	71986,900
PAD	0,643
DAU	-0,030
SILPA	0,389
LW	97,635

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan tabel 6 hasil uji regresi linear berganda maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$BM = 71986,900 + 0,643 \text{ PAD} - 0,030 \text{ DAU} + 0,389 \text{ SILPA} + 97,635 \text{ LW} + e$$

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 7. Hasil Uji F

Mode l	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig	Std	Keterangan
Regresi 1	130,959	2,463	0,000	<0,05	Model layak

Sumber : SPSS 22

Nilai F tabel 7 diperoleh berdasarkan pada df 1: (Jumlah variabel - 1) dan df 2 : (n -k - 1) sehingga diperoleh nilai 2,463. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (130,959 > 2,463) dan signifikansi <0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Uji t

Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} maka hipotesis diterima, yang berarti

variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji t

	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Std	Ket
H1	9,04 3	1,984	0,000	<0,05	Diterima
H2	- 0,53 6	- 1,984	0,593	<0,05	Ditolak
H3	3,37 8	1,984	0,001	<0,05	Diterima
H4	3,97 5	1,984	0,000	<0,05	Diterima

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa, hipotesis 1 pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk memenuhi belanjanya salah satunya adalah belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2016), Saputro (2016), Kosim (2017), Widiasih & Gayatri (2017), Sari & Robiyanto (2017), dan Ernayani (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018), yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis 2 dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalokasikan dana alokasi umum bukan untuk belanja modal tetapi untuk belanja operasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016), Sari & Robiyanto (2017) dan Ayem & Pratama (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitu *et al* (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis 3 sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan besarnya porsi SILPA dalam struktur penerimaan pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016), Kosim (2017), Putra (2017) dan Kusumawardani (2018) menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitu *et al* (2018) yang menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis 4 luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016) dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2016) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian koefisien determinasi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yang dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R ²	Adj. R ²	Kesimpulan
1	0,916	0,840	0,833	Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen 83%

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square 0,833 (83%). Berdasarkan pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa model penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 83% sedangkan sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian yang berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk penelitian selanjutnya karena penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten/kota di Jawa Tengah saja dan tidak bisa digeneralisasikan pada kabupaten/kota di provinsi lain, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas penelitian dengan menambah lokasi di provinsi lain dan diharapkan menambah variabel yang bisa mempengaruhi belanja modal seperti pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus.

REFERENSI

- Afkarina, Z., & Hermanto., S. B. (2017i). Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2012-2015.
- Andirfa, M. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016 .
- Darwanto, & Sari, Y. Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. Yogyakarta.
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar.

- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Kusumawardani, I. (2018). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Silpa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan .
- Miardi, & Ikhsan. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.
- Mulyani, H. (2016). *The Relationship Of Local Own Revenues And General Fund Allocation On Capital Expenditure Of Local Government.*
- Napitu, A. E., Dillak, V. J., & Kurnia. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal.
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Putra, F. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
- Saputro, E. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, P. P., & Robiyanto, F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Sholikhah, I., & Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa.
- Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
- Wibisono, N., & Wildaniati, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau, Silpa Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.
- Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.